

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERAN AUDITOR INTERNAL
PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh

**LUSI NOVITA SARI
56293/2010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci)

Nama : Lusi Novita Sari

NIM/BP : 56293/ 2010

Program Studi : Akuntansi

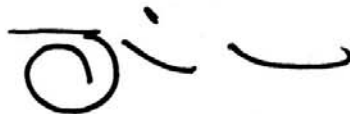
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2014

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Nayang Helmayunita, SE, M.Sc
NIP. 19860127 200812 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

ABSTRAK

Lusi Novita Sari (2010/56293). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kerinci). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2014.

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Ak
Pembimbing II : Nayang Helmayunita, SE, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Pengaruh Peran Audit Internal Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kerinci. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode *simple random sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana, $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,814 > 1,996$ (sig $0,006 < 0,05$) yang berarti H_1 diterima. (2) Peran audit internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,719 > 1,996$ (sig $0,008 < 0,05$) yang berarti H_2 diterima.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai kapasitas sumber daya manusia dan peran audit internal pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan. (2) untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian. (3) untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya juga menggunakan metode wawancara langsung dengan responden, sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kerinci)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, CA, Ak selaku Pembimbing I dan Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu tim penguji dan penelaah.

4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Pimpinan dan seluruh aparatur pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Kerinci atas bantuan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Staf kepastakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman mahasiswa angkatan 2010 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Pendidikan Ekonomi dan Manajemen yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna dalam penulisan ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat di masa yang akan datang.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	11
1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	11
a. Pengertian Laporan Keuangan	11
b. Tujuan Laporan Keuangan	12
c. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	14
d. Komponen Laporan Keuangan	17
e. Kualitas Laporan Keuangan	20
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia	22
3. Peran Audit Internal Pemerintah	26
a. Pengertian Audit	26
b. Pengertian Audit Internal	27
c. Peran Audit Internal	28
d. Peran Inspektorat	30
B. Kerangka Konseptual	37
C. Hipotesis	40

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Populasi Dan Sampel	41
C. Jenis Dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Variabel Penelitian	45
F. Pengukuran Variabel.....	46
G. Instrumen Penelitian	46
H. Uji Validitas Dan Reliabilitas	47
I. Hasil Uji Coba Instrumen	50
J. Uji Asumsi Klasik	51
K. Teknik Analisis Data	52
L. Definisi Operasional	56

BAB IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	58
B. Demografi Responden	59
C. Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas	70
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	73
E. Hasil Penelitian	77
F. Pembahasan	81

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Keterbatasan	86
C. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Kerinci	8
2. Daftar Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci	43
3. Skala Pengukuran	46
4. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	47
5. Nilai Cronbach's Alpha & Corrected Item Total Correlation	50
6. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	58
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	59
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Keahlian Yang Ditempuh	60
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	61
11. Statistik Deskriptif	62
12. Distribusi Frekuensi Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia	64
13. Distribusi Frekuensi Variabel Peran Audit Internal pemerintah	66
14. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	69
15. Nilai Cronbach's Alpha Penelitian	71
16. Nilai Corrected Item Total Correlation Penelitian	73
17. Uji Normalitas	74
18. Uji Multikolinearitas	75
19. Uji Heteroskedastisitas	76
20. Koefisien Determinasi (R^2)	77
21. Koefisien Regresi Berganda	78
22. Uji F Statistik	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian.....	92
2. Tabulasi Data Pilot Test	100
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pilot Test	103
4. Tabulasi Data Penelitian	108
5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	114
6. Uji Asumsi Klasik	124
7. Analisis Regresi Berganda	125
8. Uji F dan Uji t	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Belakang

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002:20)

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*). Apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Menurut Yosefrinaldi (2013), Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disebabkan oleh kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk

suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006 dalam Zuliarti, 2012).

Roviyantie (2011) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Menurut tim GTZ-UZAID/CLEAN Urban 2011 (dalam Harifan, 2009), pelaksanaan akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam Struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan SKPD. Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki tupoksi yang telah ditentukan. Begitupun bagian keuangan yang harus diisi oleh SDM yang memiliki kompetensi dan memahami akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya.

Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Selain kapasitas sumber daya manusia yang memadai, kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh peran audit internal pemerintah yang dalam hal ini adalah peran inspektorat sebagai pengawas intern di pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 peran Inspektorat adalah melakukan pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawabannya. Selanjutnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo saat memberikan *keynote speech* pada lokalkarya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan andal. Menurut *Institute Of Internal Auditor* (1999) disebutkan bahwa *internal auditing* adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi.

Dengan demikian, *internal auditing* membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Peran audit internal yaitu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (*quality Assurance*) terhadap laporan keuangan khususnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa: Aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Inspektorat berperan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan masing-masing SKPD mulai dari sistem pencatatannya sampai pada pelaporan keuangannya. Dari pemeriksaan ini, inspektorat akan memberikan masukan untuk koreksi bagi instansi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki keandalan informasi dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan

Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat lima opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualin (WDP), Tidak Wajar (TW), Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP), dan Wajar Tanpa Pengecualian dengan bahasa penjelasan.

Terkait dengan masalah opini laporan keuangan tersebut, Ketua BPK RI Hadi Poernomo (MetroJambi, 2012) saat penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih tergolong sangat rendah. BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 34 LKPD 7 persen, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 341 LKPD 66 persen, opini Tidak Wajar (TW) 5 persen atas 26 LKPD tahun 2011, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 115 LKPD 22 persen. Walaupun persentase yang memperoleh opini WTP dan WDP sedikit meningkat dari tahun 2010 namun hal ini masih sangat jauh dari harapan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya oleh Indriasari (2008) yang menemukan bukti empiris kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Ogan Ilir tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013), yang menyatakan kapasitas sumber daya

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif.

Selain itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga pernah dilakukan oleh Yuliani (2010), yang mengatakan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai pelaporan keuangan pada instansi pemerintah. Selain itu, Peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah kabupaten kerinci. Alasan Peneliti mengambil tempat penelitian di Kabupaten Kerinci selain karena masih terbatasnya penelitian di bidang pemerintahan khususnya di Kabupaten Kerinci juga disebabkan karena Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kerinci pada tahun 2012 masih belum juga mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut ini tabel perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Kerinci untuk tahun 2007-2012

Tabel 1
Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Kerinci
Tahun 2007-2012

Tahun	Jenis Opini
2007	WDP
2008	TMP
2009	TMP
2010	WDP
2011	WDP
2012	WDP

Sumber: IHPS BPK RI semester II tahun 2012

Dari tabel 1 diatas, dapat dilihat perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dari tahun 2007-2012 yang belum pernah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan di tahun 2008-2009 mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan membuatnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Sejauhmana peran audit internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk menentukan:

1. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh peran audit internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat memahami pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta menambah wawasan Penulis dalam bidang sektor publik.
2. Bagi Akademik, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teoritis

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and authorization Information*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi (*viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan public dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

c. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, antara lain:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa

masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
 - b. Manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu (timeliness). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

d. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

d. Komponen Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 08 Tahun 2006 laporan keuangan pemerintah setidak-tidaknya terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur-unsur yang tercakup dalam Laporan Realisasi Anggaran:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur-unsur yang terdapat dalam neraca

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c. Ekuitas dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/pemerintah daerah selama periode tertentu.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Arus Kas:

a. Penerimaan Kas

Semua aliran kas masuk dari Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah.

b. Pengeluaran Kas

Semua aliran kas keluar dari Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Menyajikan pengungkapan penjelasan yang tidak dimuat pada tiga laporan diatas, seperti metode penyusutan, metode yang dipakai dan lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan:

a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang Anggaran Pendapatan

Belanja Negara/Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

- b. Menyajikan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Menyajikan informasi tentang tentang dasar penyusutan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan pada lembaran muka (*on the face*) laporan keuangan.
- e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

e. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan,

sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Menurut Soewardjono (2005), merumuskan kualitas spesifik pelaporan keuangan dalam dua kategori, yaitu kualitas primer beserta unsur-unsurnya dan kualitas sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevanan atau keberpautan atau relevansi (*relevance*) dan keterandalan atau reliabilitas (*reliability*), dan ketepatan penyimbolan (*representational faithfulness*). Unsur keberpautan adalah nilai prediktif, nilai balik, dan ketepatanwaktu. Sedangkan unsur keterandalan adalah keterujian atau verifikasiabilitas (*verifiability*). Kualitas sekunder adalah keterbandingan (*comparability*), konsistensi (*consistency*), dan kenetralan atau netralitas (*neutrality*).

Jonas dan Blanchet (2000), menambahkan bahwa informasi keuangan bermanfaat dalam pengambilan keputusan selain relevan dan andal sebaiknya juga memiliki kejelasan (*clarity*) dalam arti dapat dimengerti atau dipahami yaitu apakah informasi keuangan jelas, padat, ringkas dan memadai. Demikian juga dengan informasi yang memiliki nilai prediktif tergantung kepada bagaimana informasi tersebut dapat menyajikan pendapatan yang tidak normal atau tidak biasa dengan diharapkan secara tepat dapat ditaksir pada periode

berikutnya. Penyajian informasi seperti ini disebut sebagai *earning persistence*.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kata kapasitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, ketika kita memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan (JICA, 2004). Dalam pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam pembangunan masyarakat, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Tim GTZ-USAID/CLEAN urban, 2001 (dalam Indriasari, *et al.* 2008), kemampuan sumber daya manusia merupakan kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi atau kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan

fungsi-fungsi akuntansi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan untuk melaksanakan fungsi ini terdiri dari:

1. Bagian keuangan memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup.
2. Minimal staf subbagian keuangan/akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi.
3. Memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugas.
4. Peran dan tanggung jawab ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.
5. Uraian tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.
6. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi.
7. Telah melaksanakan proses akuntansi.
8. Memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.
9. Dilakukannya pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian tugas.
10. Adanya dana yang dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.

Menurut Warsoko (2007:53) kemampuan (*ability*) merupakan salah satu unsur penting dalam masalah manajemen dan kepemimpinan, yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Kemampuan berhubungan dengan kecakapan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja atau produktivitas tenaga kerja,

dalam artian sejauh mana seseorang dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari kecakapan atau kemampuan yang dimiliki.

Nitisemito (1996:40) menyatakan bahwa kemampuan merupakan keterpaduan dari unsur-unsur antara lain: pendidikan, kedisiplinan, bakat, kesehatan dan keselamatan kerja, serta pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja sangat berkaitan dengan kemampuan seseorang, atau pengalaman kerja akan meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan Menurut Bagir (1988) dalam Handriko (2009:30) produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pelatihan.

Pelatihan sebagai salah satu komponen dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu untuk diberikan kepada tenaga kerja. Pelatihan akan memberikan dasar-dasar kerja secara fundamental/mendasar dari suatu deskripsi kerja yang dibebankan. Pelatihan semacam ini lebih tepat disebut sebagai pelatihan teknis. Agus dalam Handriko (2009:30) pelatihan teknis merupakan upaya pembinaan keterampilan dasar yang diperlukan pegawai baru atau lama untuk melaksanakan pekerjaan. Berkaitan dengan pengalaman kerja, kemampuan kerja, dan pelatihan yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja, lama waktu penugasan menentukan tingkat kualitas tenaga kerja yang mana ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Menurut Widjajanto (2001:20) kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak. Pendidikan yang rendah dapat diisi oleh pengalaman yang panjang. Sebaliknya, pengalaman yang pendek dapat diisi oleh pendidikan yang sesuai dan panjang, meskipun dalam beberapa jenis pekerjaan, pengalaman mutlak diperlukan. Unsur akhlak

sangat diperlukan untuk posisi-posisi jabatan yang berkaitan langsung dengan harta perusahaan, dan pucuk pimpinan yang berwenang dalam pengambilan keputusan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, dalam Seprima 2012).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Zuliarti (2012), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

3. Peran Audit Internal Pemerintah

a. Pengertian Audit

Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dari bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Audit merupakan salah satu bentuk atestasi yaitu suatu komunikasi dari seseorang yang ahli mengenai kesimpulan tentang reabilitas dari pernyataan seseorang (Sukrisno, 2008:3).

Sedangkan Elder *et al* (2011: 4) mengemukakan bahwa:

“auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent persons.”

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa audit adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian audit adalah proses yang sistematis dalam pengumpulan dan penilaian bahan bukti yang dilakukan oleh seorang ahli yang kompeten dan independen tentang informasi yang dinyatakan dengan angka (dapat diukur) dari suatu kegiatan dan kejadian ekonomi dalam suatu usaha ekonomi tertentu dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang

dapat diukur dengan kriteria yang ada dan menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Pengertian Audit Internal

Audit Internal merupakan profesi yang dinamis dan terus berkembang yang mengantisipasi perubahan dalam lingkungan operasinya dan beradaptasi terhadap perubahan dalam struktur organisasi, proses, dan teknologi.

Definisi audit internal menurut *Institute Of Internal Auditors* (IIA) yang dikutip oleh Elder *et al* (2011:450) adalah sebagai berikut:

“Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

Dari pengertian di atas maka audit internal dapat diartikan sebagai suatu aktivitas *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional perusahaan. Audit internal membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan ketat agar dapat melakukan evaluasi dan peningkatan efektivitas terhadap manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola. Sedangkan Sawyer’s (2005:9) mendefinisikan audit Internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen didalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan. Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis

dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi.

Dengan demikian, *The Institute of Internal Auditor* (1999) melakukan redefinisi terhadap internal auditing, disebutkan bahwa *internal auditing* adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian, *internal auditing* membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

c. Peran Audit Internal

Audit Internal merupakan suatu fungsi yang ada dalam suatu organisasi yang berperan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan atau aktivitas atau program di dalam organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomisnya kegiatan/aktivitas/program (Hiro Tugiman, 2002:20 dalam Rida Rosmawati, 2011).

Sawyer's (2005:10) menggambarkan lingkup audit internal modern sebagai sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah:

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan
2. Resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi

3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif.

Menurut *The International Standar for the Professionals Practice of Internal Auditing*, peran yang dimainkan oleh auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama: jasa *assurance* dan jasa konsultasi. Jasa *assurance* merupakan penilaian objektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain. Jenis dan lingkup penugasan *assurance* ditentukan oleh auditor internal. Jasa konsultasi merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien (para auditi). Dalam melaksanakan jasa konsultasi, auditor internal harus tetap menjaga obyektivitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen.

Internal audit di Pemerintahan Daerah, dalam hal ini adalah Inspektorat daerah memiliki peran sangat penting, yaitu sebagai pengawas intern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 peran inspektorat adalah melakukan pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawabannya.

d. Peran Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah Menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah mereview laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa: Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Dengan adanya pengawasan dari inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan berkualitas.

Pengawasan intern di kabupaten/kota dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang disebut inspektorat kabupaten/kota. Inspektorat kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota yang didanai dengan anggaran APBD kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan:

1. Pengawasan intern terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

a. Melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

Menurut peraturan daerah kabupaten kerinci tentang pembentukan organisasi pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah kabupaten kerinci, inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sebagai pengawas intern, Inspektorat

daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya antara lain:

1. Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009, indikator kinerja Inpektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a. Dilakukannya pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Dikembangkannya sistem informasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Menentukan apakah kebijakan atau prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (kepala daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009, indikator kinerja Inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a. Dirumuskannya prosedur yang menggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan.
- b. Ditetapkannya kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah.

3. Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009, indikator kinerja Inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut.
 - a. Dilaksanakannya Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan keuangan daerah oleh SKPD
 - b. Dilaksanakannya transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD.
 - c. Tersusunnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
4. Menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009, indikator kinerja Inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:
 - a. Disediakkannya dana penggunaan anggaran untuk program/kegiatan telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif
 - b. Adanya perencanaan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis.
 - c. Adanya personalia yang dikelola secara efektif dan efisien.

5. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009, indikator aparat Inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a. Dilaksanakannya laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan keuangan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas.
- b. Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat.

b. Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 peran inspektorat lainnya untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern sebagai pengawas intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi juga peran inspektorat yaitu melakukan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, indikator kinerja inspektorat dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, antara lain:

1. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
2. Sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah
3. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Dilaksanakannya laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas.
2. Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap, dan akurat.

Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan review menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan lainnya, aparat pengawasan intern memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang direview. Entitas wajib menindaklanjuti hasil review dengan segera melakukan koreksi terhadap laporan keuangan dan menyampaikan hasil koreksi kepada aparat pengawasan intern. Dalam hal entitas tidak melakukan koreksi seperti yang diminta oleh aparat pengawasan intern, baik karena koreksi tidak dapat dilakukan dalam periode terkait atau kelalaian, maka aparat pengawasan intern dapat

menerbitkan pernyataan telah direview dengan paragraf penjelas yang mengungkapkan mengenai penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan terkait lainnya.

Menurut Boynton (dalam Sentia, 2012), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

4. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang juga membahas penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian intern pemerintah, dengan jumlah responden 95 orang pada DPKAD se-Sumatera Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian relevan berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) yang meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap

nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, dengan jumlah responden 102 orang pada SKPD di Kabupaten Kudus. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sintia Ulfa (2012) mengenai pengaruh peran inspektorat dan implementasi *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan jumlah responden 90 orang pada SKPD di Kota Padang. Hasilnya menunjukkan bahwa peran inspektorat dan implementasi *Good Governance* berpengaruh signifikan positif. Dimana semakin baik peran inspektorat maka akan semakin baik pula kualitas dari hasil laporan keuangan.

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dan peran audit internal pemerintah/inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah.

Kualitas laporan keuangan merupakan sejauhmana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Beberapa faktor yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap kualitas laporan keuangan adalah Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal Pemerintah/peran

Inspektorat. Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan. Suatu laporan keuangan itu berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

Sumber daya manusia sebagai pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Menurut Simanjuntak (2007:1) mengemukakan penyiapan dan penyusunan laporan keuangan memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintah khususnya staf akuntansi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman dibidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Selain itu, dengan adanya kompetensi staf akuntansi yang memadai memungkinkan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas karena disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

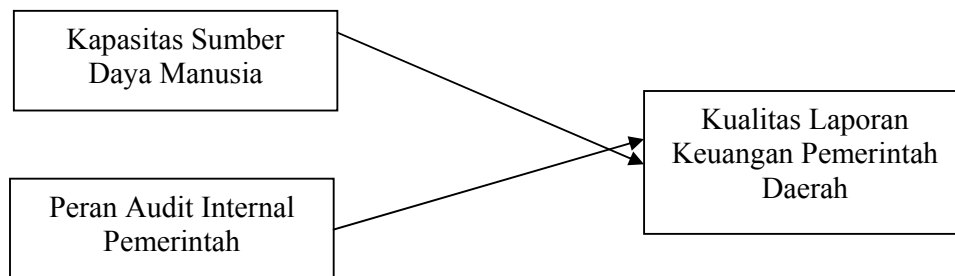
Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan Pemerintah.

Selain itu, peran audit internal pemerintah/Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien , serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuannya. Sehingga dengan adanya pengawasan intern tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Peran Inspektorat sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah mereview laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), aparat pengawasan intern pemerintah pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada

BPK. Jadi semakin efektif peran inspektorat maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

Untuk melihat keterkaitan antar variabel dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀ : Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

H_a : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

H₀ : Peran audit internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H_a : Peran audit internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah “ adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dimana semakin baik kapasitas sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Peran audit internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dimana semakin baik peran audit internal maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 34,4%. Sedangkan sisanya 65,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Kuesioner yang peneliti sebarakan masih terdapat banyak keterbatasan, Karena pernyataan didalam kuesioner peneliti hanya menggunakan pernyataan yang bersifat normatif, sehingga responden diarahkan pilihan jawaban yang baik atau positif saja.
3. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk kuesioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa kapasitas sumber daya manusia dan peran audit internal telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai kapasitas

sumber daya manusia dan peran audit internal dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan.

2. Rata-Rata TCR pada penelitian ini sudah baik. Diharapkan pemerintah Kabupaten Kerinci dapat mempertahankan TCR tersebut. Namun masih ada nilai TCR yang reratanya masih rendah, diharapkan pemerintah daerah meningkatkan pencapaian tersebut.
3. Penelitian ini masih terbatas pada kapasitas sumber daya manusia dan peran audit internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh.
4. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survey lapangan dan lain-lain.